

**PENCEGAHAN PERKEMBANGAN KAWASAN KUMUH MELALUI
PRIORITAS PENANGANAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN
PERMUKIMAN SEKITAR PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE
KOTA SUNGAI PENUH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
Strata Satu (S1)*

Disusun Oleh :

Trivaldo Alviyanda

NPM: 1810015311046

Pembimbing :

Tomi Eriawan, S.T, M.T



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Kampus I Jl. Sumatera Ulak Karang, Padang 25133 Telp. (0751) 7051676 - 7052096 Fax. 7056475
Kampus II Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Air Pacah, Padang 25176 Telp. (0751) 463250
Kampus III Jl. Gajah Mada No. 19, Olo Nanggalo, Padang 25143 Telp. (0751) 7054257 Fax. 7051341
e-mail: teknip@bunghatta.ac.id Website: www.bung-hatta.ac.id

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

TANDA PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : TRIVALDO ALVIYANDA
NPM : 1810015311046
Judul Tugas Akhir : Pencegahan Perkembangan Kawasan Kumuh Melalui Prioritas
Penanganan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Sekitar
Pasar Tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh

Padang, 18 Agustus 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Tomi Eriawan, S.T, M.T

Disetujui Oleh :

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Dekan



Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc.

Diketahui Oleh :

Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota
Ketua Jurusan

Era Triana, S.T, M.Sc, Ph.D

**PENCEGAHAN PERKEMBANGAN KAWASAN KUMUH MELALUI PRIORITAS
PENANGANAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PERMUKIMAN SEKITAR
PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE KOTA SUNGAI PENUH**

Nama : Trivaldo Alviyanda
NPM : 1810015311046
Pembimbing : Tomi Eriawan, S.T, M.T

ABSTRAK

Berdasarkan SK Kumuh Kota Sungai Penuh kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang berada di wilayah administratif Desa Pasar Baru Kecamatan Sungai Penuh merupakan kawasan kumuh. Padahal disekitar pasar tersebut terdapat kawasan permukiman yang memiliki ciri-ciri kumuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan infrastruktur yang sesuai dijadikan prioritas peningkatan. Metode analisis yang dipakai yaitu analisis pembobotan untuk mengetahui tingkat kekumuhan dan mengetahui prioritas penanganan infrastruktur. Hasil penelitian ini adalah tingkat kekumuhan kawasan permukiman sekitar pasar adalah tidak kumuh dan prioritas penangan infrastrukturnya adalah pengelolaan persampahan. Perlu dilakukan intervensi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Prioritas Penanganan, Pasar Tradisional Tanjung Bajure

PERSETUJUAN PUBLIKASI OLEH

Pembimbing



Tomi Eriawan, S.T, M.T

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, waktu dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Pencegahan Perkembangan Kawasan Kumuh Melalui Prioritas Penanganan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh”**.

Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) pada jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta Padang.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Agustian dan Ibunda Zulbaidah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa serta materi yang tidak henti-hentinya kepada ananda. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta dan Bapak Dr. Al Busyra Fuandi, S.T, M.Sc selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Era Triana S.T, M.Sc, Ph.D selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Tomi Eriawan S.T, M.T selaku Pemimbing Penyusunan Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan membimbing hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini serta Ibu Dr. Ir. Haryani, MTP dan Ibu Rini Asmariati, S.T, M.T selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam laporan tugas akhir.

5. Seluruh saudara Planologi 18 yang merupakan teman angkatan seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya laporan penelitian tugas akhir ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2023

Penulis

Trivaldo Alviyanda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Sasaran	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Sasaran	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi.....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Materi	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tahap Pengumpulan Data	9
1.5.2 Metode Analisis	15
1.6 Kerangka Berfikir	23
1.7 Keluaran	24
1.8 Sistematika Penulisan	24
BAB II	26
2.1 Permukiman Kumuh	26
2.1.1 Pengertian Permukiman	26
2.1.2 Pengertian Kumuh	27
2.1.3 Pengertian Permukiman Kumuh	28
2.1.4 Karakteristik Permukiman Kumuh	29
2.2 Pencegahan Perkembangan Kawasan Permukiman Kumuh.....	30
2.3 Standar Indikator Kawasan Permukiman Kumuh.....	32
2.4 Analisis Identifikasi Permukiman Kumuh dan Prioritas Penanganan ...	34
2.4.1 Identifikasi	34
2.4.2 Infrastruktur	35

2.4.3	Bangunan Hunian.....	35
2.4.4	Jaringan Jalan.....	38
2.4.5	Drainase	41
2.4.6	Air Bersih.....	43
2.4.7	Pengelolaan Sampah	45
2.4.8	Pengelolaan Air Limbah	49
2.4.9	Proteksi Kebakaran	51
2.4.10	Prioritas Penanganan.....	52
2.4.11	Strategi Tentang Penanganan Permukiman Kumuh	52
BAB III	58
3.1	Gambaran Umum Kota Sungai Penuh	58
3.1.1	Letak Geografis.....	58
3.1.2	Keadaan Fisik Dasar Wilayah.....	61
3.1.3	Kependudukan	72
3.1.4	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011- 2031.....	72
3.1.5	Kawasan Permukiman Kumuh Kota Sungai Penuh.....	76
3.2	Gambaran Umum Lokasi Studi	77
3.2.1	Letak Geografis.....	77
3.2.2	Keadaan Fisik Dasar Lokasi Studi	79
3.2.3	Kependudukan Lokasi Studi	79
3.2.4	Kondisi Infrastruktur Kawasan Permukiman.....	80
BAB IV	128
4.1	Analisis Tingkat Permukiman Kumuh.....	128
4.1.1	Penentuan Persentase Pada Kriteria Permukiman Kumuh	128
4.1.2	Perhitungan Pembobotan Permukiman Kumuh	131
4.2	Analisis Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur.....	137
4.2.1	Penentuan Prioritas Penanganan Infrastruktur	137
4.2.2	Sebaran Kondisi Infrastruktur	140
4.2.3	Rencana Penanganan Pengolahan Persampahan.....	145
BAB V	149
5.1	Kesimpulan	149

5.2 Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Data yang Dibutuhkan	10
Tabel 1.2 Jumlah Responden Lokasi Studi	13
Tabel 1.3 Rumus Perhitungan Permukiman Kumuh	16
Tabel 1.4 Kriteria dan Sub-Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh	18
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Sungai Penuh	58
Tabel 3.2 Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh	61
Tabel 3.3 Kondisi Topografi Kota Sungai Penuh	63
Tabel 3.4 Kondisi Kelerengan Kota Sungai Penuh	65
Tabel 3.5 Pola Ruang di Kota Sungai Penuh	70
Tabel 3.6 Kependudukan	72
Tabel 3.7 Daftar Lokasi Kawasan Kumuh Kota Sungai Penuh	76
Tabel 3.8 Keteraturan Bangunan Hunian	82
Tabel 3.9 Kepadatan Bangunan Hunian	85
Tabel 3.10 Kelayakan Bangunan Hunian	87
Tabel 3.11 Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	90
Tabel 3.12 Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	94
Tabel 3.13 Kemampuan Drainase dalam Mengalirkan Limpasan Air	97
Tabel 3.14 Cakupan Pelayanan Drainase	100
Tabel 3.15 Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan	103
Tabel 3.16 Akses Aman Air Bersih	106
Tabel 3.17 Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	108
Tabel 3.18 Pengelolaan Air Limbah	111
Tabel 3.19 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	114
Tabel 3.20 Ketersediaan Prasarana dan Sarana Persampahan	118
Tabel 3.21 Prasarana dan Sarana Pengeloan Persampahan Berdasarkan Peninjauan Kepala Keluarga	119
Tabel 3.22 Sistem Pengelolaan Persampahan	123
Tabel 3.23 Aspek Proteksi Kebakaran	126
Tabel 4.1 Penentuan Persentasi Setiap Kriteria Permukiman Kumuh	128
Tabel 4.2 Perhitungan Skoring Tingkat Kekumuhan	131

Tabel 4.3 Penilaian Tingkat Keparahan Kualitas Infrastruktur	139
Tabel 4.4 Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur.....	140
Tabel 4.5 Sebaran Kondisi Infrastruktur.....	141
Tabel 4.6 Analisis Penanganan Kriteria Pengolahan Persampahan.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi Studi	8
Gambar 1.2 Peta Sebaran Responden	14
Gambar 1.3 Kerangka Berfikir.....	23
Gambar 2.1 Kondisi Permukiman Tidak Teratur.....	36
Gambar 2.2 Kondisi Kepadatan Bangunan yang Tinggi	37
Gambar 2.3 Kualitas Bangunan yang Tidak Memenuhi Syarat.....	38
Gambar 2.4 Kawasan Permukiman Tidak Terlayani Jaringan Jalan	40
Gambar 2.5 Kondisi Permukaan Jalan Lingkungan yang Rusak.....	41
Gambar 2.6 Kondisi Jalan yang Tidak Dilengkapi Saluran Drainase.....	42
Gambar 2.7 Kondisi Drainase yang Tidak Optimal.....	42
Gambar 2.8 Kondisi Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk	43
Gambar 2.9 Kondisi Penumpukan Sampah	49
Gambar 2.10 Kondisi sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	50
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Sungai Penuh	60
Gambar 3.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh	62
Gambar 3.3 Peta Topografi Kota Sungai Penuh	64
Gambar 3.4 Peta Kelerengan Kota Sungai Penuh.....	66
Gambar 3.5 Peta Hidrologi Kota Sungai Penuh	69
Gambar 3.6 Pola Ruang Kota Sungai Penuh	71
Gambar 3.7 Peta Lokasi Studi	78
Gambar 3.8 Bangunan Hunian Tidak Teratur.....	81
Gambar 3.9 Peta Kriteria Keteraturan Bangunan Hunian.....	83
Gambar 3.10 Kepadatan Bangunan Hunian.....	84
Gambar 3.11 Ketidaksesuaian Bangunan Hunian dengan Persyaratan Teknis ...	86
Gambar 3.12 Peta Kriteria Kelayakan Bangunan Hunian	88
Gambar 3.13 Lebar Jalan Lingkungan	89
Gambar 3.14 Peta Kriteria Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	91
Gambar 3.15 Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	93
Gambar 3.16 Peta Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	95

Gambar 3.17 Peta Kriteria Drainase Dalam Mengalirkan Limpasan Air	98
Gambar 3.18 Ketidakterediaan Drainase.....	99
Gambar 3.19 Peta Kriteria Ketidakterediaan Drainase	101
Gambar 3. 20 Kualitas Konstruksi Drainase.....	102
Gambar 3.21 Peta Kriteria Kualitas Pelapis Kontruksi Drainase	104
Gambar 3.22 Gambar 3.22 Ketersediaan Akses Aman Air Bersih.....	105
Gambar 3.23 Peta Kriteria Akses Air Bersih.....	107
Gambar 3.24 Peta Kriteria Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	109
Gambar 3.25 Peta Kriteria Sistem Pengelolaan Air Limbah	112
Gambar 3.26 Peta Kriteria Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah.....	115
Gambar 3.27 Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	117
Gambar 3.28 Peta Kriteria Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ...	120
Gambar 3. 29 Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis.....	122
Gambar 3.30 Peta Sistem Pengelolaan Persampahan	124
Gambar 3.31 Peta Prasarana Proteksi Kebarakan.....	127
Gambar 4.1 Sebaran Kerusakan Infrastruktur	144
Gambar 4.2 Rencana Penanganan Pengelolaan Persampahan.....	148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu kota dapat terbentuk dari adanya konsentrasi penduduk yang mungkin awalnya hanya terdiri dari puluhan atau ratusan orang, tetapi kemudian berkembang hingga belasan juta orang dengan membentuk sejumlah lokasi permukiman. Dari proses tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu permukiman merupakan salah satu bagian dari pembentuk kota. (Nasution dalam Makarau, 2011). Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan jumlah ketersediaan lahan untuk permukiman yang tetap maka terjadi persaingan untuk mendapatkan tempat bermukim. Persaingan tempat bermukim ini bukan hanya dilihat dari ketersediaan lahannya saja, tapi masyarakat juga melihat dari sisi lokasi. Lokasi permukiman yang dekat dengan berbagai pusat kegiatan merupakan sasaran utama dari pemilihan tempat permukiman (Nasution dalam Makarau, 2011). Dengan kondisi yang seperti ini menyebabkan tidak jarang pada lokasi permukiman yang dekat dengan pusat kegiatan akan timbul beberapa titik konsentrasi permukiman hunian yang padat.

Tingginya jumlah penduduk di pusat kota mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan permukiman yang layak huni, khususnya untuk menampung kaum urbanis yang pekerjaannya terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa di kawasan komersial yang ada di pusat kota. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di pusat kota ini menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk bermukim di kawasan tersebut. Mereka membutuhkan tempat hunian lebih banyak berada di sekitar kawasan komersial kota, hal ini dimungkinkan juga karena mereka mendekati pusat perdagangan untuk membuka usaha dengan memanfaatkan keramaian dan padatnya pengunjung yang berdatangan ke pusat-pusat perbelanjaan di kota. Selain itu alasan lain

bagi masyarakat tertarik untuk bertempat tinggal di sekitar kawasan pasar tradisional karena lebih memudahkan jangkauan tempat kerja bagi mereka.

Kondisi seperti ini juga terjadi di Kota Sungai Penuh, terutama di kawasan pasar tradisional Tanjung Bajure yang berada dekat dengan pusat Kota Sungai Penuh. Kawasan ini diperuntukan bagi aktivitas perdagangan dan jasa. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat baik dari Kota Sungai Penuh sendiri maupun kota-kota kecil disekitarnya untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pasar tradisional Tanjung Bajure tersebut. Di kawasan ini terdapat plaza atau pusat pertokoan, pasar tradisional, pertokoan, dan kawasan permukiman. Jadi posisi kawasan permukiman berada disekitaran Pasar Tradisional Tanjung Bajure.

Kebanyakan kaum urbanis yang datang adalah mereka yang ingin berjualan di pasar dan sebagian besar mereka dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Mereka mencari tempat tinggal di sekitar kawasan pusat perdagangan ini. Dengan adanya pemusatan kegiatan perdagangan ini akan menyebabkan masalah bagi struktur perencanaan kota (Daljoeni 2003: 78). Selain itu perkembangan jumlah hunian disekitaran kawasan pasar tradisional Tanjung Bajure ini kurang diimbangi oleh ketersediaan lahan, sehingga untuk menambah jumlah hunian mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar tentang pengadaan bangunan rumah seperti kualitas bahan, jenis ruang, garis sempadan jalan maupun jarak antar rumah. Bahkan mereka menggunakan sebagian badan jalan untuk didirikan bangunan untuk pengembangan tempat tinggal maupun usahanya yang menyebabkan permukiman tersebut menjadi kumuh dan suasana yang tidak tertib yang berakibat pada berubahnya kualitas lingkungan fisik kawasan. Perubahan kualitas lingkungan fisik kawasan akibat aktivitas permukiman ini ditandai dengan terjadinya perusakan estetika lingkungan seperti ketidaksesuaian tampilan bangunan hunian yang semi permanen maupun tidak permanen dengan bangunan formal yang ada di sekitarnya, berkurangnya kenyamanan dan luasan sarana jalan karena sebagian badan jalan didirikan bangunan, tidak adanya penghijauan maupun ruang terbuka hijau pada halaman rumah karena masyarakat menggunakan halaman untuk pengembangan bangunan, serta tidak ada lagi lahan yang dapat

digunakan untuk membangun sarana lainnya seperti sarana pendidikan ataupun keagamaan serta sarana bermain anak.

Dengan memanfaatkan potensi yang ada disekitar kawasan pasar tradisional Tanjung Bajure, penduduk membangun membuka usaha di rumah. Karena terbatasnya lahan dan tingginya harga tempat usaha, maka mereka membuka usaha toko, industri kecil maupun warung dan kaki lima di rumah. Aktivitas yang heterogen ini adalah akibat adanya perbedaan kondisi ekonomi yang terjadi di kota-kota di Indonesia yang menyebabkan adanya perbedaan aspek-aspek kehidupan. Kegiatan perdagangan dalam skala besar biasanya dimiliki oleh mereka yang termasuk golongan ekonomi kuat sedang kegiatan ekonomi sektor informal baik pedagang kaki lima maupun yang membuka warung atau kios dilakukan oleh masyarakat yang termasuk golongan ekonomi lemah maupun tidak mampu.

Menurut SK Walikota Sungai Penuh Nomor 663/Kep.24/2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sungai Penuh tahun 2022, total luas kawasan kumuh yang ada di Kota Sungai Penuh adalah 231,92 Ha. Kawasan kumuh tersebut meliputi delapan lokasi yang tersebar di tujuh kecamatan yaitu :

- Kawasan Pinggiran Sungai Batang Merao di Kecamatan Hampan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai
- Kawasan Hampan Rawang di Kecamatan Hampan Rawang
- Kawasan Kumun Debai di Kecamatan Kumun Debai
- Kawasan Pasar Baru Sungai Penuh di Kecamatan Sungai Penuh
- Kawasan Pesisir Bukit di Kecamatan Pesisir Bukit
- Kawasan Sungai Jernih di Kecamatan Pondok Tinggi
- Kawasan Sungai Ning di Kecamatan Sungai Bungkal
- Kawasan Tanah Kampung di Kecamatan Tanah Kampung

Pada SK Walikota Sungai Penuh Nomor 663/Kep.24/2022 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sungai Penuh tahun 2021, hanya kawasan pasar tradisional Tanjung Bajure yang berada di wilayah administratif Desa Pasar Baru Kecamatan Sungai

Penuh yang termasuk kedalam kawasan kumuh. Padahal disekitar pasar tradisional tersebut terdapat kawasan permukiman yang memiliki ciri-ciri permukiman kumuh.

Studi kasus dalam penelitian ini berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Pondok Tinggi yang tersebar di dua Kelurahan/Desa yaitu Kelurahan Pondok Tinggi dan Desa Gedang. Fokus wilayah penelitian ini adalah di sekitaran kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure dengan titik kawasan yang memiliki ciri-ciri permukiman kumuh berada di RT001-RT006 Desa Gedang (9,48 hektar) dan RT005-RT008 Kelurahan Pondok Tinggi (6,46 hektar) dengan jumlah total luas kawasan 15,94 hektar. Kawasan studi ini berbatasan langsung dengan Pasar Tradisional Tanjung Bajur Desa Pasar Baru, dimana pasar tersebut termasuk kedalam lokasi kumuh pada SK Kumuh. Kawasan studi yang dimaksud dengan kawasan permukiman sekitar pasar adalah kawasan permukiman yang berada paling dekat atau berbatasan langsung dengan pasar tradisional menurut wilayah administrasi.

Oleh karena itu, dengan menyadari permasalahan-permasalahan ini, perlu ditinjau kembali tingkat permukiman kumuh disekitar pasar tradisional Tanjung Bajure dengan mengambil studi kasus kawasan permukiman yang berada di sekitar kawasan pasar tradisional tersebut. Diharapkan melalui studi penelitian ini dapat diketahui tingkat kekumuhan pemukiman dan pencegahan kumuh, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi serta dapat menciptakan aktivitas permukiman yang terkendali sesuai dengan tatanan lingkungan yang seimbang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dilakukan penelitian dengan judul ***“Pencegahan Perkembangan Kawasan Kumuh Melalui Prioritas Penanganan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh”***

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan aktivitas permukiman padat penduduk yang semakin berkembang di Kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh ini, menimbulkan berbagai permasalahan bagi penataan ruang kawasan

permukiman secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

- Kekumuhan kawasan permukiman ditinjau dari aspek fisik, yang terlihat dari:
 - Munculnya bangunan-bangunan tidak permanen baru di badan jalan maupun di trotoar yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan kenyamanan pengguna jalan,
 - Tidak adanya jarak antar bangunan yang mengakibatkan rumah menjadi tidak sehat,
 - Kumuhnya permukiman akibat aktivitas kawasan yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan lingkungan hunian menjadi tidak sehat dan tidak nyaman untuk ditinggali,
 - Tidak berfungsinya saluran drainase kota di kawasan tersebut secara optimal,
 - Sampah dan limbah akibat aktivitas warga yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan pemandangan yang kotor,
 - Kurangnya sarana prasarana juga kurang terpeliharanya sarana prasarana (jalan lingkungan, tempat sampah, MCK umum)
- Terlalu padatnya jumlah penduduk, yang kurang seimbang dengan daya tampung ruang hunian dan penataan ruang yang kurang tepat.
- Merupakan kawasan diluar SK Walikota tentang permukiman kumuh tapi memiliki ciri-ciri permukiman kumuh dan berpotensi menjadi kumuh

Dengan memperhatikan kondisi permasalahan di atas, maka perlu diadakan suatu penelitian untuk mengetahui:

- Bagaimana tingkat kekumuhan berdasarkan kondisi infrastruktur pada kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh?
- Bagaimanakah penanganan yang sesuai untuk melakukan pencegahan permukiman kumuh, berdasarkan prioritas kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan infrastruktur yang sesuai dijadikan prioritas peningkatan kualitas di kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure

1.3.2 Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, maka akan diadakan sasaran penelitian sebagai berikut:

- Melakukan Penilaian tingkat kekumuhan kawasan dan keparahan kriteria permukiman kumuh.
- Mengidentifikasi penanganan permukiman kumuh berdasarkan prioritas kualitas infrastruktur
- Merumuskan pendekatan penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan solusi yang di tawarkan untuk masyarakat.

1.4 Ruang Lingkup

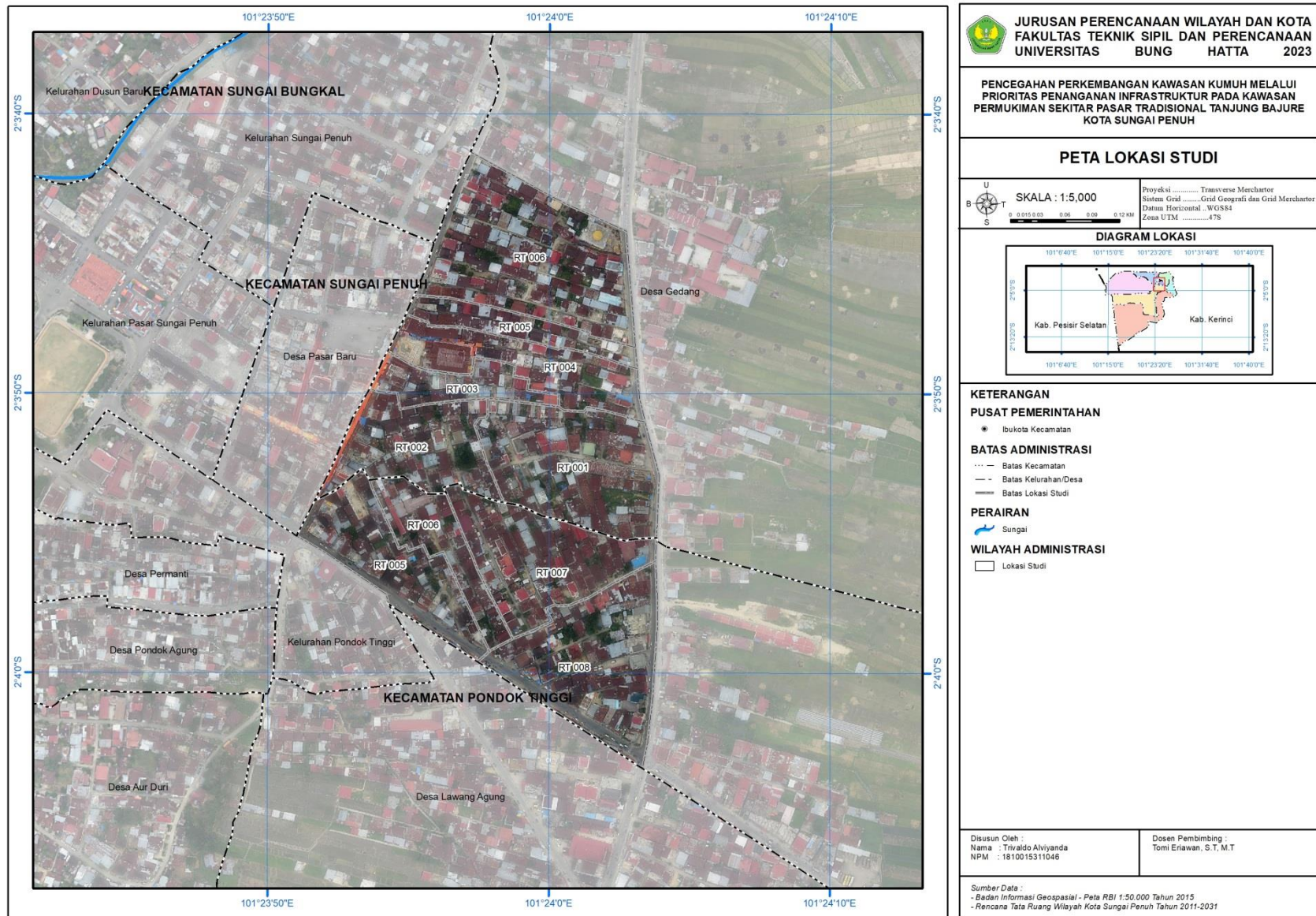
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Ruang Lingkup dalam studi berada di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, terletak antara 101° 23' 58.202" Bujur Timur 2° 3' 51.614" Lintang Selatan dengan luas wilayah 15,94 Ha. Lokasi studi berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Kelurahan Sungai Penuh dan Desa Gedang
- Sebelah Selatan : Desa Lawang Agung
- Sebelah Timur : Desa Gedang
- Sebelah Barat : Kelurahan Pondok Tinggi dan Desa Permanti

Berdasarkan lingkup wilayah penelitiannya, penelitian ini difokuskan kepada 10 titik kawasan permukiman kumuh yang berada di kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Titik kawasan permukiman kumuh adalah RT001-RT006 Desa Gedang dan RT005-RT008 Kelurahan Pondok Tinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat di **Gambar 1.1 Peta Lokasi Studi** sebagai berikut :

Gambar 1.1 Peta Lokasi Studi



1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini membahas terkait dengan bagaimana menentukan kawasan permukiman kumuh yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas infrastruktur berdasarkan aspek fisik pada Permen PU No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Dalam menentukan kawasan prioritas, perlu adanya identifikasi kondisi infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh. Infrastruktur yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini adalah (1) bangunan hunian (2) jalan lingkungan (3) air bersih (4) drainase lingkungan (5) pengelolaan air limbah (6) pengelolaan persampahan (7) proteksi kebakaran, yang kemudian dilakukan analisis kualitas infrastruktur untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kawasan prioritas.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tahap Pengumpulan Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Masalah, tujuan, dan hipotesa penelitian, untuk sampai pada suatu kesimpulan harus didukung oleh data-data yang relevan.

Relevansi data dengan variabel-variabel penelitian didasari oleh metode pendekatan masalah yang relevan (Sumaatmaja, 1998:104). Pada suatu proses penelitian, tahapan pengumpulan data merupakan tahapan yang harus direncanakan untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal yang sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian pada proses-proses selanjutnya. Sumber-sumber data yang dibutuhkan guna penyusunan studi ini adalah:

1. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi yang terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis. Di samping itu, data sekunder lainnya adalah studi literatur untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan studi, yaitu terkait dengan permukiman,

masalah permukiman kumuh, dan upaya penanganan permukiman kumuh.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei ke beberapa instansi pemerintah yang diharapkan dapat menjadi sumber data, yaitu:

- Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sungai Penuh

Waktu pengumpulan data sekunder disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Tabel 1.1
Rincian Data yang Dibutuhkan

No	Data	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	Peta Citra Satelit	Citra Satelit	Sekunder	Citra Satelit Tahun 2022
2	RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031	Dokumen	Sekunder	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh
3	SK Kumuh	Dokumen	Sekunder	Dinas PERKIM Kota Sungai Penuh
4	Permen PU No. 14 Tahun 2018	Dokumen standar/norma	Sekunder	Internet
5	Identifikasi karakter hunian	Fungsi bangunan	Primer	Observasi Lapangan
		Tampilan bangunan		
6	Identifikas karakter sarana/prasarana	Jalan Lingkungan	Primer	Observasi Lapangan
		Sumber Air Bersih		
		Persampahan		
		Drainase		
		Sanitasi		
		Proteksi kebakaran		

Sumber : Penulis, 2023

2. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui survai primer yang dilakukan melalui pengamatan dan pengukuran atau penghitungan langsung (observasi) di kawasan permukiman sekitar pasar

Tanjung Bajure dan penyebaran kuesioner atau pertanyaan kepada para masyarakat yang mengetahui keadaan dan kondisi kawasan.

Teknik Pengumpulan Data Primer :

- Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan cara pengamatan dilapangan yaitu pada kawasan permukiman yang menjadi objek pengamatan. Mengamati langsung berarti bahwa sekaligus melakukan perekaman data yang tepat untuk mendapatkan informasi perilaku yang sifatnya sangat dinamis, yang kemudian hasil dari perekaman tersebut akan dikompilasi dengan mempergunakan tabel survey yang telah disediakan. Tentunya selain perlengkapan form dan peta survei diperlukan juga alat berupa Avenzamap untuk menandai kondisi indikator kumuh dan kamera yang berguna mengambil gambar permasalahan fisik yang terdapat pada kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure.

- Kuisoner

Penyebaran kuisoner bertujuan untuk mendapatkan data berupa kondisi indikator kumuh lokasi studi. Dari 7 indikator kumuh hanya 4 indikator kumuh yang akan dilakukan pendataan kuisoner, seperti kondisi drainase menurut kriteria limpasan air hujan, kondisi air minum, kondisi pengelolaan air limbah, dan kondisi pengelolaan persampahan. Karena 4 indikator kumuh tersebut merupakan data rumah tangga, sedangkan indikator lain merupakan data dari hasil pengamatan lapangan.

Teknik yang di gunakan untuk mendapatkan sampel dengan kesempatan yang sama adalah sampel acak (*random sampling*). Random sampling adalah proses pemilihan sampel dimana seluruh anggota populasi

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Masing-masing anggota pada populasi tersebut memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk di pilih. *Sampling* jenis ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang merata dari berbagai populasi dalam hal ini RT 01-RT 06 (Desa Gedang) dan RT 05-RT 08 (Kelurahan Pondok Tinggi). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Berdasarkan hasil pengamatan di ArcGis yang dilakukan penulis, diketahui bahwa jumlah bangunan hunian terdapat pada lokasi studi ini mencapai 878. Jadi diasumsikan bahwa satu bangunan hunian memiliki satu kepala keluarga yang berarti jumlah kepala keluarga kawasan studi adalah 878 kepala keluarga. Untuk itu penentuan sampel menggunakan rumus Slovin, dimana penggunaan rumus slovin mengasumsikan bahwa nilai data akan berdistribusi normal atau hampir normal.

$$n \geq \frac{N}{1+N.e^2}$$

Dengan keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Populasi Keseluruhan Sampel

E : Error estimate, yaitu nilai yang menentukan derajat kepercayaan dari studi yang dilakukan

Nilai derajat kesalahan yang diambil sebesar 10%. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengambilan sampel akan mempunyai kepercayaan sebesar 90%. Jumlah responden yang dimaksud pada penelitian ini adalah kepala keluarga dengan asumsi satu keluarga adalah

satu kepala keluarga. Berikut adalah perhitungan sampel pada penelitian ini:

$$n \geq \frac{N}{1+N.e^2}$$

$$n \geq \frac{878}{1+(878 \times 0.1^2)}$$

$$n \geq 90$$

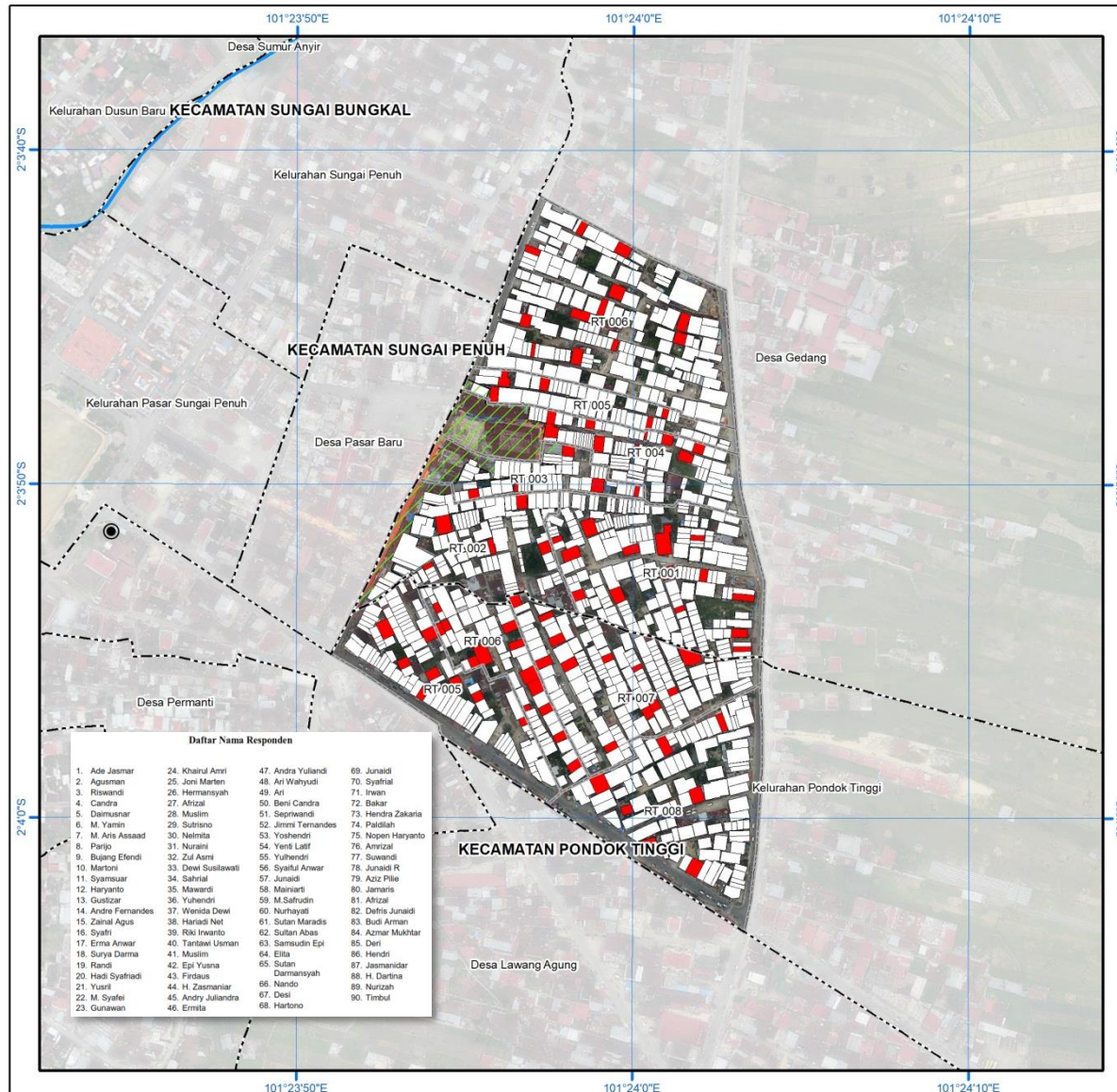
Dengan tingkat kepercayaan 90% dan jumlah populasi 878 keluarga, maka berdasarkan rumus tersebut jumlah sampel sasaran pertama penelitian ini adalah 90 responden. Jumlah sampel 90 ini selanjutnya akan diambil secara acak, tanpa memperhatikan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan masyarakat. Penyebaran responden ini dilakukan secara acak dan merata agar dapat menjangkau keseluruhan kawasan studi dan tidak terpusat dalam satu titik kawasan. Berikut ini merupakan **Tabel 1.2 Jumlah Responden Lokasi Studi dan Gambar 1.2 Peta Sebaran Responden** pada kawasan permukiman di sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure:

Tabel 1.2
Jumlah Responden Lokasi Studi

No	Desa/Kelurahan	RT	Jumlah Bangunan (Unit/KK)	Jumlah Responden (Kepala Keluarga)
1	Desa Gedang	RT 01	139	14
		RT 02	51	5
		RT 03	51	5
		RT 04	83	9
		RT 05	45	5
		RT 06	124	12
2	Kelurahan Pondok Tinggi	RT 05	81	8
		RT 06	107	11
		RT 07	133	14
		RT 08	64	7
Total			878	90

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 1.2 Peta Sebaran Responden



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA 2023

PENCEGAHAN PERKEMBANGAN KAWASAN KUMUH MELALUI
PRIORITAS PENANGANAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN
PERMUKIMAN SEKITAR PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE
KOTA SUNGAI PENUH

PETA SEBARAN RESPONDEN
LOKASI STUDI

U
N
S

SKALA : 1:5.000

Proyeksi Transverse Mercator
 Sistem Grid Grid Geografi dan Grid Merchator
 Datum Horizontal WGS84
 Zona UTM 47S

DIAGRAM LOKASI

Kab. Pesisir Selatan Kab. Kerinci

KETERANGAN

PUSAT PEMERINTAHAN

- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan/Desa
- Batas Lokasi Studi

PERAIRAN

- Sungai

SEBARAN RESPONDEN

- Bangunan Non Responden
- Responden
- Kawasan Pasar

Disusun Oleh :

Nama : Trivaldo Alviyanda

NPM : 1810015311046

Dosen Pembimbing :

Tomri Eriawan, S.T, M.T

Sumber Data :
 - Badan Informasi Geospasial - Peta RBI 1:50.000 Tahun 2015
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031

1.5.2 Metode Analisis

Metode analisis diperlukan dalam analisis data penelitian. Metode analisis menjelaskan mengenai teknik analisis data. Analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis Deskriptif Kuantitatif.

1. Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul di wilayah penelitian. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan prosentase. Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting permukiman kumuh tiap area dari sebuah sampel yang teramati dan dapat digambarkan lewat tabel, grafik dan gambar untuk melihat kondisi fisik Bangunan, Jalan Lingkungan, Air minum, Drainase lingkungan, Pengolahan air limbah, Pengolahan persampahan, Proteksi Kebakaran.

2. Analisis Pembobotan

a Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan

Analisa pembobotan dilakukan untuk menilai kondisi eksisting dengan kriteria yang sudah ditentukan. Penilaian adalah angka yang diberikan kepada setiap indikator yang besarnya menunjukkan derajat atau tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan penilaian dengan sistem pembobotan pada

masing-masing kriteria pada umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda – beda.

Untuk perumusan masalah kedua metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dari hasil survey berupa skor dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi sesuai kriteria kumuh yang ditetapkan di didalam Permen PUPR no.2/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, untuk melihat karakteristik permukiman kumuh di kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Adapun analisis kualitatif dilakukan dengan analisis deskriptif, yaitu untuk mengelompokkan faktor yang diduga menyebabkan kekumuhan dan perumusan model penanganan yang sesuai dengan karakteristik dan faktor yang diduga penyebab kekumuhan.

Tabel 1.3
Rumus Perhitungan Permukiman Kumuh

Aspek	Kriteria	Data Numerik dan Rumus Perhitungan	
		Numerik	Rumus
1.Kondisi Bangunan Gedung	a Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur (unit)	$\frac{\sum \text{bangunan tidak teratur (unit)}}{\sum \text{bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
	a. Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas kawasan 200/250 < (unit/ha)	$\frac{\text{Luas kawasan 200/250} <}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100\%$
	b. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tdk sesuai persyaratan teknis (unit)	$\frac{\text{Jml bangunan tdk sesuai persyaratan teknis (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
2.Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Ideal (m) – Panjang Jalan Eksisting (m)	$\frac{\text{Panjang Jalan Ideal (m)} - \text{Panjang Jalan Eksisting (m)}}{\text{Panjang Jalan Ideal (m)}} \times 100\%$
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan ⁷	Panjang Jalan Rusak (m)	$\frac{\text{Panjang jalan rusak}}{\text{Panjang Jalan Ideal}} \times 100\%$
3.Kondisi Penyediaan Air Minum	c. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	\sum KK tidak terakses air minum Aman	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum Aman}}{\text{Jumlah KK responden}} \times 100\%$
	d. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	\sum KK tidak terakses air minum cukup	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum cukup}}{\text{Jumlah KK responden}} \times 100\%$

Aspek	Kriteria	Data Numerik dan Rumus Perhitungan	
		Numerik	Rumus
4.Kondisi Drainase Lingkungan	e. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$
	f. Ketidaktersediaan Drainase	Panjang Drainase Ideal (m) – Panjang Drainase Eksisting (m)	$\frac{\text{Panjang Drainase Ideal (m)} - \text{Panjang Drainase Eksisting (m)}}{\text{Panjang Drainase Ideal (m)}} \times 100\%$
	g. Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang Drainase yang buruk (m)	$\frac{\text{Panjang Drainase yang Rusak (m)}}{\text{Panjang Drainase Ideal (m)}} \times 100\%$
5.Kondisi Pengelolaan Air Limbah	h. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis	$\frac{\text{Jumlah KK dg sistem air limbah tdk sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK responden}} \times 100\%$
	i. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	$\frac{\text{Jumlah KK dengan Sarpras air limbah tidak sesuai}}{\text{Jumlah KK responden}} \times 100\%$
6.Kondisi Pengelolaan Persampahan	j. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis	$\frac{\text{Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persvaratan teknis}}{\text{Jumlah KK responden}} \times 100\%$
	k. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	$\frac{\text{Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK responden}} \times 100\%$
7.Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
	b Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (Unit)	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran}}{\text{Jumlah Bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$

Sumber : Lampiran 2 Permen PU Nomor 14 Tahun 2018

Tabel 1.4
Kriteria dan Sub-Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan hunian terhalang oleh bangunan lain dan tidak terakses langsung ke jalan Posisi muka bangunan hunian tidak menghadap ke jalan Bangunan hunian berdiri diatas garis sempadan sungai, sungai, rawa, danau dan laut Bangunan hunian berdiri diperlitasan SUTET dan kawasan pembuangan limbah industri 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
		Tingkat Kepadatan Bangunan	Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5
				51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3
				25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Luas bangunan hunian kurang dari 7,2 meter²/jiwa kondisi atap bangunan bocor atau rusak kondisi lantai bangunan kayu/tanah kondisi dinding kayu 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1
2	Kondisi Jaringan Jalan	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3
				25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas permukaan	3

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
				jalan yang buruk	
				25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1
3	Kondisi Jaringan Air bersih	Akses aman air bersih tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air bersih yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan jarak antara sumber air bersih dengan sarana pengolahan air limbah lebih dari 10 meter	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
				51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3
				25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1
		Kebutuhan air bersih minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
				51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
				25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5
				51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3
				25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1
		Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5
				51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3
				25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
		Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3
				25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> • kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik • tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1
6	Kondisi Pengelolaan Sampah	Sistem persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1
		Prasarana dan sarana persampahan tidak	Tidak tersedianya sarana pengumpulan lingkungan dan pengangkutan lingkungan	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
		memenuhi dengan persyaratan teknis		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3
				25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • pasokan air • jalan lingkungan • sarana komunikasi • data sistem proteksi kebakaran lingkungan 	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
				51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
				25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
		Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemadam Api Ringan (APAR) • kendaraan pemadam kebakaran • mobil tangga sesuai kebutuhan 	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
				51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
				25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

Sumber, Permen PU Nomor 14 Tahun 2018

Adapun skor untuk penilaian tingkat kekumuhan ialah:

- Tidak Kumuh (0-15)
- Kumuh Ringan (16-37)
- Kumuh Sedang (38-59)
- Kumuh Berat (60-80)

b. Identifikasi Prioritas Penanganan Pada Infrastruktur

Untuk menentukan infrastruktur prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria infrastruktur permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki tingkat kerusakan atau tingkat nilai kumuh paling tinggi. Penanganan prioritas infrastruktur pada tingkat kerusakan atau kekumuhan paling tinggi perlu dilakukan pencegahan karena kawasan berpotensi menjadi kumuh jika tidak dilakukan tindakan penanganan.

Analisa prioritas peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan dengan menggunakan metode skoring dan klasifikasi. Berdasarkan Permen PU No 14 tahun 2018 pemberian nilai skor setiap sub kriteria , berdasarkan parameter penilaian:

$$N = \sum Si$$

Dimana:

N = Total Nilai

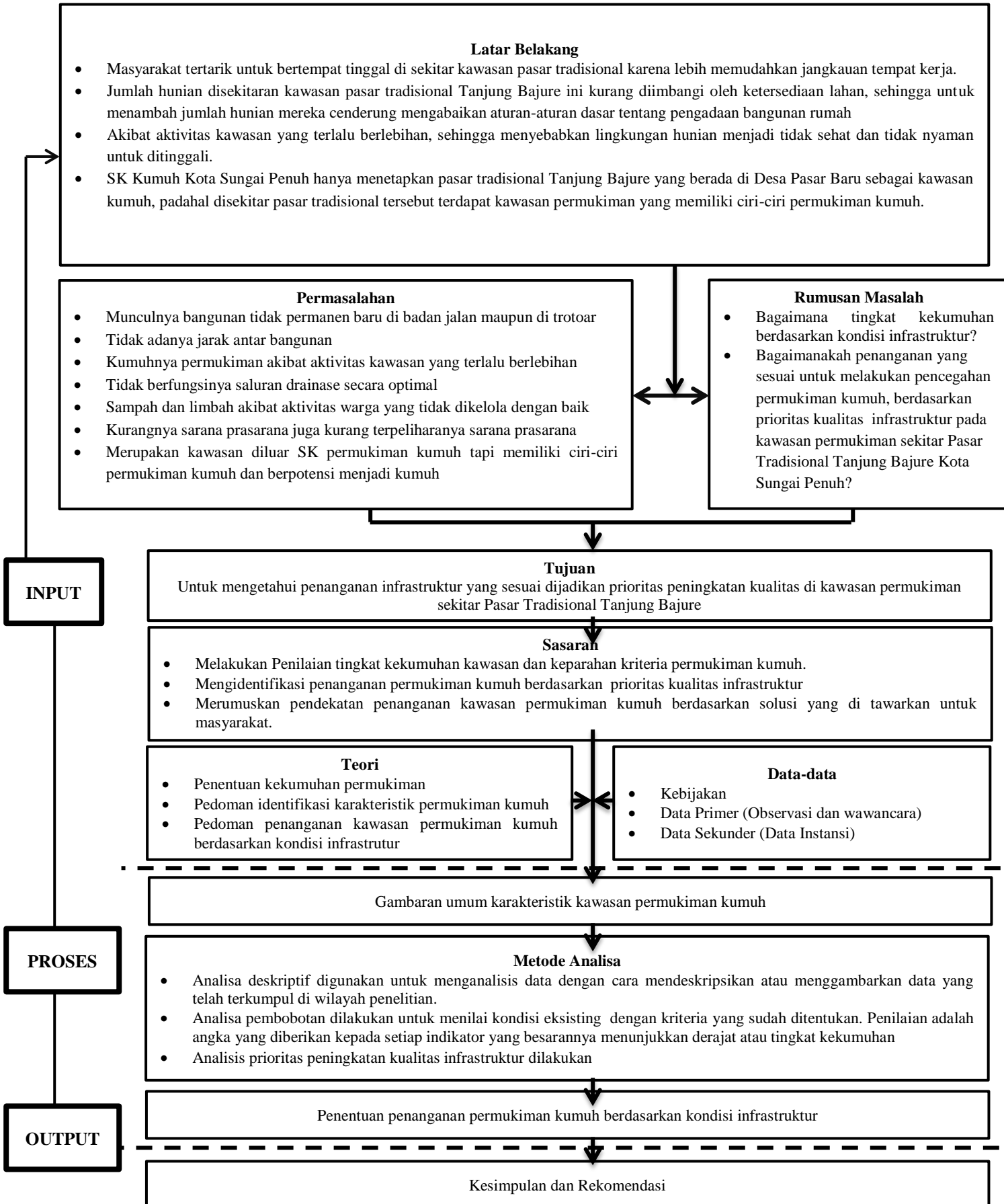
Si = Total Skor pada Setiap Indikator

Dengan menggunakan perhitungan rumus diatas sehingga didapatkan nilai klasifikasi prioritas untuk setiap kelas yaitu:

- Tingkat Keparahan Ringan : 0 – 5
- Tingkat Keparahan Sedang : 6 – 10
- Tingkat Keparahan Berat : 11- 15

1.6 Kerangka Berfikir

Gambar 1.3
Kerangka Berfikir



1.7 Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari studi ini adalah nilai tingkat kekumuhan dan prioritas penanganan yang berdasarkan dengan kondisi infrastrukturnya. Sehingga dapat dijadikan prioritas pembangunan di kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Identifikasi Tingkat Permukiman Kumuh dan Prioritas Penanganan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, metodologi penelitian, kerangka berfikir, keluaran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai undang-undang, peraturan dan kebijakan, terkait dengan penentuan kawasan permukiman kumuh, serta standar analisis permukiman kumuh dan parameter yang digunakan pada masing-masing variabel.

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN STUDI

Bagian ini berisikan mengenai kondisi umum wilayah studi, termasuk kondisi eksisting dari kondisi fisik kelurahan, kondisi fisik infrastruktur, penggunaan lahan, dan pusat-pusat kegiatan sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure pada saat ini.

BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN PERKEMBANGAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PRIORITAS PENANGANAN INFRASTRUKTUR

Pembahasan pada bab ini terkait dengan proses pengolahan data untuk mengidentifikasi kondisi infrastruktur kawasan permukiman kumuh dan mengidentifikasi kawasan prioritas dalam peningkatan kawasan permukiman kumuh di kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Membahas tentang hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang lebih membangun untuk penelitian-penelitian sejenis dengan tujuan penelitian selanjutnya lebih baik.